

Anggaran KKP untuk Pemerataan Kesejahteraan

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2017 adalah pemerataan kesejahteraan. Karena itu, anggaran KKP tahun ini yang sebesar Rp 9,2 triliun, selain harus bisa mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) juga harus mampu menjaga agar ketimpangan pendapatan tidak kian melebar.

Susi menuturkan, keberpihakan terhadap masyarakat penting untuk pemerataan kesejahteraan. KKP dengan anggaran Rp 9,2 triliun pada 2017 harus bisa mendorong pertumbuhan PDB, sekaligus tetap menjaga agar ketimpangan pendapatan tidak melebar. “Kami ingin melakukan pemerataan. Jika tidak, korporasi besar akan menguasai. Kami bukan anti korporasi besar. Tapi untuk membendung kesenjangan, pemerintah wajib membuat keberpihakan. Kami tidak sedang mendikotomikan antara penduduk pribumi dan nonpribumi, di antara sesama penduduk pribumi pun ada ketidakadilan. Yang menjadi sasaran kami adalah pemerataan, salah satunya terkait penyaluran bantuan

yang harus tepat sasaran,” kata Susi di Jakarta, Kamis (19/1).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Gini Rasio Indonesia pada 2016 tercatat sebesar 0,39 atau di bawah 2015 yang masih 0,4. Meski hal itu menunjukkan adanya perbedaan, pemerintah tetap harus melakukan pemerataan ekonomi. Pasalnya, mengacu pada Global Wealth Report, hingga 49,3% kekayaan di Indonesia hanya dikendalikan 1% penduduk. Menurut Susi, hal itu menunjukkan adanya ketidakadilan kesempatan ekonomi, sehingga kebijakan yang afirmatif (*affirmative policy*) harus diambil guna membuka akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin dan yang termarjinalkan. “Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden pada saat Sidang Kabinet Paripurna agar para menteri bekerja untuk menurunkan kesenjangan pendapatan. Kami akan berupaya mengaktifkan belanja pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kita perlu persiapan dengan maksimal pelaksanaan program 2017 ini. Ini sesuai evaluasi kamera KKP 2016,” kata Susi, kemarin.

Di satu sisi, lanjut dia, pemerintah harus mengurangi defisit belanja

negara. Karena itu, KKP fokus agar belanja program pemerintah tepat

sasaran, yakni dengan sasaran peningkatan kemampuan semua pelaku industri perikanan di Indonesia, baik lokal dan nasional, khususnya pelaku perikanan skala kecil dan menengah (UMKM). “Tidak boleh ada lagi perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar, sedangkan nelayan kecil dipersulit. Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil. Dan bantuan KKP diprioritaskan untuk nelayan, pembudidaya, dan petambak garam yang betul-betul membutuhkan,” kata Susi.

Untuk itu, Susi mengaku telah menginstruksikan jajaran KKP untuk turun melakukan penanaman lapangan langsung, terutama untuk mencapai transparansi pengumuman calon penerima bantuan. Untuk mewujudkan hal itu, KKP membutuhkan bantuan media dan masukan dari masyarakat agar tidak ada lagi kelompok yang mendapat bantuan berdasarkan kedekatan dengan oknum pejabat di daerah. KKP juga mengupayakan integrasi data, Satu Data, guna memperoleh data pelaku perikanan yang sudah pernah menerima bantuan dari KKP. (eme)

Ekspor Pisang RI Tembus 16 Negara

LAMPUNG TIMUR – Ekspor pisang Indonesia sepanjang 2016 mencapai 17,4 juta ton dengan tujuan negara di dunia, di antaranya Timur Tengah, Malay- Iran, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sebanyak 85% h total ekspor pisang tersebut berasal dari Provinsi Lampung. “Ekspor buah pisang segar asal Provinsi Lampung mengalami peningkatan signifikan dalam tahun terakhir, sehingga menempati urutan kedua terbesar untuk ekspor buah-buahan sepanjang 2016,” kata Stefanus Mannkley, salah satu eksporir pisang asal Lampung, di Lampung Timur, kemarin.

Buah pisang menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia selama tiga tahun terakhir. Data dari Kementerian Pertanian (Kemantan), seperti analisis *Antara*, pada 2016 buah pisang segar menjadi komoditas ekspor buah-buahan kedua terbesar di Indonesia. Sebanyak 85% pengeksportnya berasal dari Lampung. Ekspor buah pisang segar Indonesia pada 2016 mencapai 17,4 juta ton. Tercatat 16 negara tujuan ekspor buah pisang segar Indonesia, di antaranya Timur Tengah, Malaysia, Iran, China, dan Korea Selatan.

Total ekspor buah pisang segar asal Lampung pada 2016 mencapai 14,9 juta ton, ekspor tiranya yaitu PT Nutra Tera Tropical Farm (NTT) di Kabupaten Lampung Timur, dan PT Great Giant Pineapple Co. (GGPC) di

PT SORINI AGRO ASIA Corporation Tbk
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SORINI AGRO ASIA CORPORATION Tbk.

Berkedudukan di Kabupaten Pasuruan
 (“Persoran”)

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Persoran akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat Luar Biasa”) pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, Pukul 13.00 - selesai di Intercontinental Midplaza Hotel, Jl. Jenderal Sudirman Kav 10-11, Jakarta Pusat, Indonesia.

Pemanggilan untuk Rapat dan Rapat Luar Biasa akan dititipkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Februari 2017.

Yang berhak untuk hadir atau diwakilii dalam Rapat dan Rapat Luar Biasa adalah:

- Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Februari 2017 selambatnya pukul 16.15 WIB;
- Untuk saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tertanggal 5 Februari 2017 selambatnya pukul 16.15 WIB; dan
- Bagi pemegang rekening efek di KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Berhubs Rapat (“KTUR”).

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat dan Rapat Luar Biasa jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat dan Rapat Luar Biasa yang bersangkutan dikeluarkan oleh Perseroan.